

**PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM TERHADAP PELAKSANAAN
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN
DATI II BANTAENG**



BOSOWA

Oleh

IRWAN RANI

4593021064

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
Menempuh ujian Sarjana Negara
Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1998

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas "45" Ujung Pandang di bawah ini :

N a m a : IRWAN RANI

No. Stb : 45 93 021 064

Nirm : 994110051002

Jurusan : Ilmu Administrasi

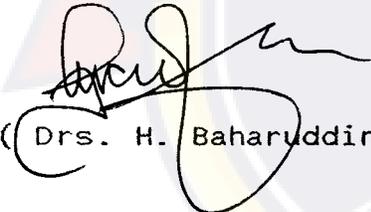
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM
TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK
PEMBANGUNAN JALAN DAERAH DI
KABUPATEN DATI II BANTAENG.

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,


(Drs. H. Baharuddin, M,Si)

(Dra. Juharni)

Mengesahkan


Dekan Fakultas ISIPOL
Universitas "45"


(Drs. H. Hamka, MS)
NIP : 130 935 970

Ketua Jurusan Ilmu
Administrasi Negara


(Drs. Marten D. Palobo)
NIK : D.45 01 03

HALAMAN PENERIMAAN

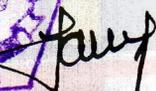
Pada hari ini, Sabtu Tanggal 16 Bulan Januari Tahun 1999
Skripsi dengan judul : PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM
TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK
PEMBANGUNAN JALAN DAERAH DI
KABUPATEN DATI II BANTAENG.

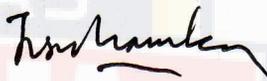
N a m a : IRWAN RANI
No. Stb/Nirm : 45 93 021 064/9941100510026
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"
Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana negara pada jurusan Ilmu
Administrasi Negara.



Pengawas Umum


DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA
Rektor Universitas "45"


Drs. HUSAIN HAMKA, MS
Dekan Fisip Univ "45"

Panitia Ujian


Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS,
Ketua


Drs. H. Baharuddin, M.Si
Sekretaris

Tim Penguji

1. Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS, (Ketua) (.....)
2. Drs. H. Baharuddin, M,Si (Anggota) (.....)
3. Drs. M. Ridwan Iskandar (Anggota) (.....)
4. Drs. M. Natsir Tompo (Anggota) (.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya juaalah sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul :
PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DAERAH DI KABUPATEN DATI II BANTAENG.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, maupun keterbatasan waktu, sehingga apa yang disajikan masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan, berhubungan adanya kesulitan yang penulis temui baik dalam penelitian ataupun penyusunannya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Drs. Husain Hamka, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

3. Drs. Marten D. PALobo, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fisipol Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Bapak Drs. H. Baharuddin, MSi dan Ibu Dra. Juharni sebagai pembimbing pertama dan kedua yang telah meluangkan waktunya mengarahkan, membimbing, memberi petunjuk sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Dosen/Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fisipol yang telah mendidik, membimbing, memberikan petunjuk sehingga penulis dapat selesai.
6. Bapak Drs. Asikin Solthan selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian.
7. Bapak Ir. H. Zainuddin Tahir selaku Kepala Dinas PUK Daerah Tingkat II Bantaeng dan aparatnya yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian.
8. Kedua orang tua Ayahanda Andi Muslimin Rani dan Ibunda Ny. Hj. Hadasiah Dg. Ngempo yang tercinta yang telah membesarkan penulis, membimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang tak henti-hentinya, membiayai, mendoakan sampai selesai.

9. Yang tercinta Sukmawati Suyuti S.Sos yang telah banyak memberikan motivasi dan bantuannya untuk segera menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh keluarga, rekan-rekan teman yang membantu, memberi dorongan selama dalam pendidikan sampai selesai.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuannya dan jasa baik dari semua pihak dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis doakan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.-

Ujung Pandang, Juli 1998

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Pengawasan	15
B. Pengertian Program Pembangunan	18
C. Dasar dan Tujuan Program Pembangunan	21
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	24
A. Sejarah Singkat Berdirinya	24

B. Struktur Organisasi Dinas PUK	26
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	32
D. Keadaan Pegawai	34
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan	37
B. Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan Jalan dan Hasilnya	54
C. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan	63
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel :	Halaman
01 Keadaan Pegawai Dinas PUK Kabupaten Dati II Bantaeng Menurut Pendidikan	35
02 Keadaan Pegawai Dinas PUK Menurut Golongan/Ruang	36
03 Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Dinas PU Terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan di Kabupaten Dati II Bantaeng	40
04 Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Disiplin Petugas	44
05 Tanggapan responden Tentang Peningkatan Pengawasan Dinas PU Terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan	53
06 Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan di Kabupaten Dati II Bantaeng	60
07 Tanggapan Responden Tentang Peningkatan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Kabupaten Dati II Bantaeng	62
08 Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Atasan Langsung Pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sedangkan hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat.

Secara konseptual ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 tentang pola dasar pembangunan nasional, baik yang sifatnya jangka panjang maupun jangka pendek. Pola dasar pembangunan Nasional ini telah dirumuskan pula dalam berbagai program pembangunan, seperti pembangunan lima tahun (Repelita).

Pengawasan yang dilakukan badan perencanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan proyek pembangunan di daerah merupakan langkah yang sangat penting untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan sebelumnya, dengan maksud untuk lebih menjamin pelaksanaan proyek pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan program yang telah disusun dan ditetapkan.

Usaha pemerintah dalam pembangunan yang telah berlangsung selama Repelita ini telah menunjukkan peningkatan diberbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, melalui pembangunan sektoral dan regional. Hal ini dapat dilihat pada berbagai kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di daerah-daerah setiap tahunnya.

Berhasilnya pelaksanaan pada umumnya dan program pembangunan Daerah Tingkat II pada khususnya sangat ditentukan oleh efisiensi dan efektifitas pengawasan dalam pelaksanaan program pembangunan disegala bidang. Sangat menentukan suatu tujuan pembangunan yang dikehendaki karena pengawasan dalam pembangunan mempunyai peranan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta produktivitas kerja dalam pengelolaan proyek pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini.

Untuk dapat tercapainya dan terpenuhinya hal-hal tersebut di atas perlu adanya usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah serta peningkatan keselarasan antar pembangunan sektoral dan pembangunan regional.

Dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan keseimbangan dan kesinambungan di daerah diperlukan perencanaan, yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Karena itu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengawasan pembangunan nasional di daerah yang dilaksanakan dewasa ini maupun pada masa-masa yang akan datang. Apabila diperhatikan pengawasan jalannya pembangunan daerah adalah merupakan basis dari semua kegiatan pemerintah, maka mutlak diperlukan pembinaan dan penataan disegala bidang pembangunan diperlukan adanya suatu pengawasan yang mantap.

Pelaksanaan pengawasan pembangunan jalan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan jalan mengandung

maksud, untuk melihat apakah hasilnya berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah ataukah mengalami hambatan yang memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh untuk penyempurnaannya.

Dinas pekerjaan umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng terhadap pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan merupakan bagian integral pengawasan pembangunan perlu ditingkatkan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan Negara seperti misalnya penyalagunaan keuangan pembangunan daerah, sehingga disini merupakan alasan penulis memilih judul: "Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng". Sehingga yang menjadi alasan-alasan pokok yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan jalan dewasa ini tidak dapat diselesaikan tepat waktu pelaksanaan untuk proyek itu cukup sementara bendaharawan bekerja sama dengan pimpinan proyek menyisihkan sebagian dana proyek pembangunan untuk kebutuhan sendiri.

2. Sebaliknya dana yang disediakan untuk pelaksanaan proyek pembangunan ternyata lebih atau ada saldo, sementara pimpinan proyek membuat kuitansi palsu seakan-akan dana yang disediakan semuanya habis dipakai/digunakan, olehnya itu diperlukan adanya pengawasan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
3. Pelaksanaan proyek pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya untuk itu diperlukan pengawasan proyek pembangunan yang mantap.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Apabila kita melihat uraian latar belakang tersebut, maka untuk menghindari kesimpang siuran dalam pembahasan nantinya maka perlu diberikan batasan masalah dimana penulis hanya membatasi pada pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Karena pelaksanaan proyek pembangunan jalan diperlukan pengawasan yang berarti melakukan fungsi wewenang tanggung jawab serta hak dan kewajibannya yang selanjutnya tidak menimbulkan akibat yang

merupakan permasalahan. Masalah tersebut memerlukan pemecahan dan penyelesaian, karena begitu banyaknya masalah yang ada sedangkan peneliti mempunyai keterbatasan waktu biaya dan dana. Untuk itu penulis hanya mengambil sebagian saja untuk dipecahkan dalam skripsi ini seperti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan program pembangunan jalan dan hasilnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ?
3. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan program pembangunan jalan dan hasilnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

2. Kegunaan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dalam proses perencanaan proyek pembangunan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan di Perpustakaan dan menjadi bahan perbandingan dengan peneliti selanjutnya.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang untuk memperoleh gelar sarjana.

D. Kerangka Konseptual

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah terdiri dari proyek-proyek yang merupakan bagian dari berbagai proyek pembangunan sektoral. Pada tingkat daerah proyek tersebut diusahakan agar menjadi bagian dari pembangunan daerah yang terpadu dan berperan sebagai penggerak dan pendorong jalannya pembangunan daerah yang bersangkutan.

Dalam era pembangunan sekarang ini proyek pembangunan sangat lazim didengar, baik pada sektor pemerintahan yang sangat besar artinya dalam pembangunan. Pengertian proyek pembangunan konotasinya beraneka ragam dimana unit terkecil dari usaha perencanaan adalah proyek maka dapatlah dikatakan bahwa proyek adalah suatu kesatuan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sesuatu hasil atau sasaran tertentu dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut diusahakan melalui penyediaan sumber-sumber dana, manusia, dan peralatan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat menggambar bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan

proyek pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pengawasan berikut ini mengutip pendapat Soewarno Handyaningrat, 1981:143) menjelaskan bahwa:

"Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana pemerintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan."

Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya tetapi mencari kebenaran sesuai dengan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Sehubungan dengan itu, maka mengenai pengertian proyek pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo, (1985:4) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Administrasi Pembangunan menjelaskan bahwa:

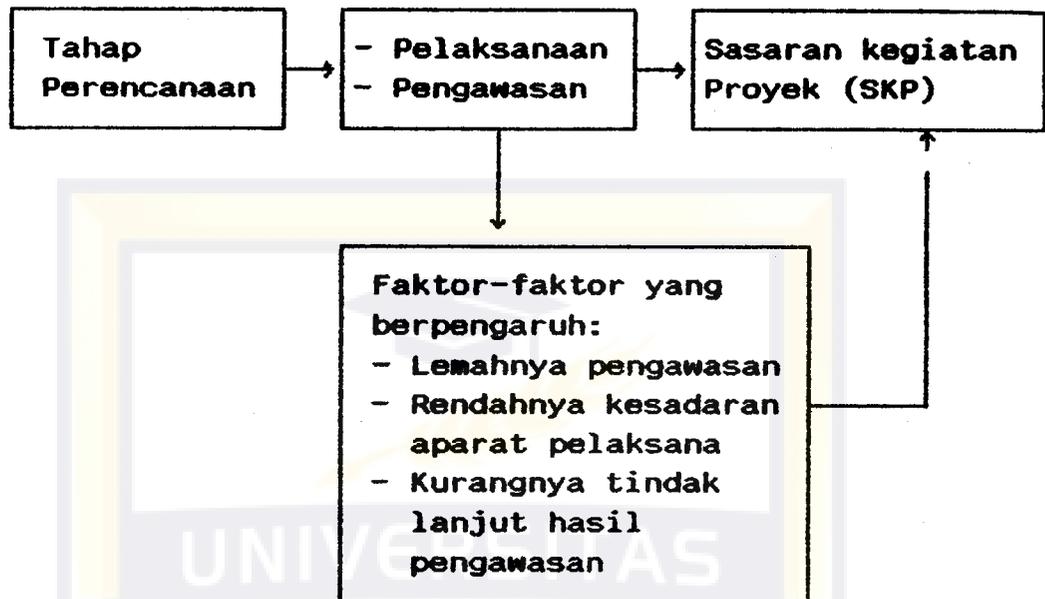
"Proyek adalah usaha bagaimana mencapai suatu hasil tujuan (product goal) dalam periode yang relatif singkat, dengan mengusahakan sumber-sumber pembiayaannya, dan merencanakan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu."

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa suatu keberhasilan penggunaan amat tergantung pada keberhasilan proyek yang dilaksanakan dengan melalui suatu perencanaan, pelaksanaan dan meng-evaluasi hasil proyek tersebut.

Dengan demikian proyek sangat dipengaruhi oleh dan tergantung pada:

- a. Baik tidaknya perencanaan proyek
- b. Masalah teknis yang menyangkut pelaksanaan kegiatan proyek tersebut.
- c. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi kegiatan proyek tersebut.
- d. Manajer proyek dan tenaga yang digunakan dalam pelaksanaan proyek.
- e. Pemastian mengenai sumber dan biaya secara tepat.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka konseptual pengawasan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dapat dilihat pada skema di bawah ini:

BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL:**E. Metode Penelitian****1. Tipe dan Dasar Penelitian****a. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah survei yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data

variabel dari sejumlah responden melalui wawancara.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (Pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti yang sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
- b. Wawancara (Interview) yaitu penulis mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung kepada sejumlah responden yang dianggap lebih mengetahui masalah yang diteliti khususnya dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Bantaeng.
- c. Angket (kuesioner) yaitu pengumpulan data dengan mengedarkan sejumlah angket atau daftar pertanyaan kepada setiap responden yang dipilih secara purposive.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng sebanyak 30 orang.

b. Sampel

Adapun sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah pegawai pada Kantor Dinas PUK sebanyak 30 orang pegawai. Dan sebagai informan adalah 6 orang pejabat yang terkait langsung dengan pelaksanaan proyek.

4. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan diseleksi dengan cermat kemudian di analisis secara kualitatif dengan menggunakan tabel-tabel sederhana dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Pengertian Pengawasan, Pengertian program pembangunan, Dasar dan Tujuan program pembangunan.

Bab ketiga yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pekerjaan Umum, Struktur Organisasi dan tata kerjanya, dan Keadaan personil.

Bab keempat yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas tentang pengawasan Dinas PU terhadap pelaksanaan pembangunan jalan, pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan jalan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan jalan.

Bab kelima yaitu merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengawasan

Untuk mencapai pelaksanaan tujuan kegiatan administrasi, maka dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu untuk mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif, maka perlu untuk diperhatikan fungsi organik administrasi dan manajemen yang antaranya adalah fungsi pengawasan, karena tanpa adanya pengawasan ini kemungkinan tidak dapat diketahui dengan jelas dan pasti apakah sebenarnya tujuan yang dikehendaki itu dapat tercapai secara efisien dan efektif, atau jauh dari sasaran yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli dan ilmuan mengenai pengertian pengawasan seperti telah dikemukakan oleh Sujamto, (1983 : 28) dijelaskan bahwa:

"Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya dan atau tidak."

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan itu adalah merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk dapat mengevaluasi kegiatan mengetahui serta menilai kenyataan yang sebenarnya yaitu apakah kenyataan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan itu dimaksudkan untuk dapat mencegah atau dapat memperbaiki kesalahan, penyempurnaan ketidaksi-
sesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Jadi pada prinsipnya bahwa maksud dari pengawasan adalah bukan untuk mencari kesalahan terhadap hasil pekerjaan, namun hal ini sejalan dengan tujuan pengawasan yaitu agar hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi menjelaskan bahwa:

"Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan dari organisasi untuk dapat menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya." (1982 : 73).

Dari pengertian tersebut di atas dapat digambarkan, bahwa pengawasan pada umumnya adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pemborosan-pemborosan, dan kegagalan-kegagalan dalam mencapai tujuan.

Sasaran pengawasan adalah untuk dapat mewujudkan efisiensi, efektivitas, penghematan dan ketertiban dalam melaksanakan pengawasan, dimana dari hasil pengawasan tersebut dapatlah dijadikan bahan guna pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk:

- a. Menghentikan berbagai penyimpangan-penyimpangan, pemborosan-pemborosan dan penyelewengan-penyelewengan yang telah terjadi.
- b. Mencegah agar tidak terjadi atau terulangnya hal-hal tersebut di atas.

Karena itu sistem pengawasan baru dapat bermakna manakalah diikuti suatu tindakan koreksi yang tepat dan berbagai tindak lanjut atas hasil temuan pelaksanaan pengawasan adalah merupakan salah satu tanggung jawab dari setiap pimpinan pada tingkat apapun dalam suatu organisasi agar berbagai tindakan

yang dapat merugikan dan menghambat dapat segera diatasi.

B. Pengertian Program Pembangunan

Dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan pembangunan yang dicita-citakan mutlak harus dilaksanakan melalui program pembangunan umumnya berorientasi terhadap masyarakat karena bukan saja para pengambil kebijaksanaan yang melakukan program pembangunan jalan akan tetapi yang berperan aktif adalah masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh I Nyoman Beratha, (1982 : 71) dijelaskan bahwa:

"Instuisi-instuisi kemasyarakatan seperti gotong royong, pemufakatan dan lain-lain sebagainya yang hidup dalam masyarakat perlu diperiksa seksama untuk akhirnya nilai-nilai positif dari instuisi-instuisi itu dapat berkembang dan untuk kehidupan nasional pada umumnya."

Dari pengertian di atas, maka operasional kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut dalam pembangunan khususnya terhadap masyarakat dan pemerintah.

Dengan adanya program pembangunan yang harus dipelihara setiap tahunnya mengharap/mengharuskan pemerintah Kabupaten Dati II Bantaeng untuk meng-

alokasikan anggaran yang cukup besar bagi pembangunan jalan, peningkatan dan atau pemeliharaan pembangunan jalan ini dirasakan cukup mempereratkan pemerintah daerah.

Seorang tokoh studi Implementasi Indonesia yaitu, Mohammad Syukur Abdullah dalam makalahnya yang berjudul: "Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi", (1988:9) menjelaskan bahwa:

"Proses implementasi program kebijaksanaan ialah kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijaksanaan ditetapkan) yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun olerasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai tujuan yang akan ditetapkan semula."

Demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan implementasi merupakan tahapan melaksanakan apa yang telah direncanakan menjadi sebuah kenyataan. Apabila telah ditetapkan dan dirumuskan kebijaksanaan dasar dan strategis pembangunan, penyusunan rencana menyalurkan dengan kerangka makro rencana dan perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan maka disusun program investasi dan sasaran rencana bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan. Hal ini harus didukung

secara serasi dengan kerangka kebijaksanaan pembangunan yang konsisten serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang khusus mendukung pembangunan sektor-sektor tersebut.

Menurut SP. Siagian, (1985 : 3) menjelaskan bahwa:

"Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan."

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa fungsi perencanaan adalah merupakan fungsi pokok manajemen yang pertama dikatakan yang pertama karena fungsi pokok manajemen lainnya bertitik tolak dari yang telah direncanakan, sedangkan perencanaan merupakan hasil dari perencanaan. Penyusunan program pembangunan jalan perlu pula dipertimbangkan atas dasar pilihan mengenai peran pemerintah terhadap sektor swasta dan pembagian kerja atas sektor pemerintah dan sektor swasta.

Dalam program investasi dimaksudkan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana masing-masing bidang atau sektor tersebut. Sudah barang tentu harus

dipertimbangkan kemungkinan dipertimbangkannya kemungkinan pencapaiannya, skala prioritas yang tajam, menunjang pertumbuhan dan hubungan yang sesuai yang serasi serta saling mendukung.

Program atau rencana pelaksanaan pembangunan jalan masing-masing bidang atau sektor terdiri dari berbagai program pembangunan yang harus dilaksanakan. Program pembangunan jalan ini terdiri dari proyek-proyek pembangunan yang merupakan unit terkecil daripada aktivitas investasi yang harus diperhitungkan dalam proses perencanaan.

Menyadari keterbatasan ini dikaitkan dengan kemampuan di daerah menyediakan anggaran daripada pendapatan daerah maka untuk membantu kesulitan pemerintah daerah maka pemerintah pusat memberikan bantuan proyek pembangunan jalan khusus pada pemerintah daerah tingkat II melalui program Inpres bantuan pembangunan daerah tingkat II.

C. Dasar dan Tujuan Program Pembangunan

Sebagaimana telah diketahui bahwa Inpres jalan, yaitu merupakan suatu proyek pembangunan jalan di

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dimana sumber dananya berasal dari pemerintah pusat yang memberikan kepada Daerah Tingkat II Bantaeng atau Instruksi Presiden.

Yang dimaksud dengan program pembangunan jalan daerah Bantaeng adalah bantuan pembangunannya langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja Negara untuk pembangunan proyek-proyek pembangunan jalan di lingkungan/wilayah Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantuan tersebut diharapkan pemerintah setempat dapat menggunakan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat, dengan tujuan utamanya ialah menciptakan lapangan kerja dan memperluas lapangan kerja di daerah melalui pelaksanaan proyek-proyek pembangunan jalan. Kemudian secara jelasnya dari tujuan maupun sasaran dari bantuan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1983 tanggal 7 Mei 1983 tentang pedoman pelaksanaan bantuan pembangunan proyek daerah Tingkat II bahwa:

"Bantuan program pembangunan daerah tingkat II bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan. Bantuan pembangunan daerah tingkat II digunakan untuk pembangunan proyek-proyek lain yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan lingkungan proyek-proyek lain di daerah yang bersangkutan."

Adanya bantuan proyek pembangunan jalan tersebut tidaklah berarti bahwa pemerintah setempat bebas menggunakannya atau dengan kata lain tidak sepenuhnya bantuan tersebut diserahkan kepada daerah tingkat II di dalam hal penentuan sasarannya, akan tetapi untuk ketetapan pencapaian tujuannya serta kemanfaatannya olehnya itu dalam menggunakan atau penggunaan bantuan sasaran, pemerintah daerah tingkat II diberikan pengarahan secara umum dari pemerintah pusat.

Program ini selain bertujuan untuk memperluas dana menciptakan lapangan kerja, juga karena program ini adalah melaksanakan program pembangunan jalan proyek-proyek pada tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II maka dengan demikian program ini menunjang pelaksanaan rencana-rencana pembangunan ditingkat Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II Bantaeng.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas PU

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Dati II Bantaeng dibentuk pada tahun 1956, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten yang pertama adalah MK. ASSAGAB dan dibantu oleh beberapa orang pegawai yaitu Nurdin Ambo, Zainuddin Tahir, Bonto dan Baso Bella. Adapun wilayah kerjanya pada waktu itu meliputi:

- a. Kabupaten Bantaeng
- b. Kabupaten Bulukumba
- c. Kabupaten Selayar
- d. Kabupaten Sinjai

Setelah MK. ASSAGAB dipensiunkan yaitu pada tahun 1958 maka beliau diganti oleh Bapak Zainuddin. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan dengan sendirinya Daerah Tingkat II Bantaeng menjalankan urusan rumah tangganya sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Wilayah Kerja Dinas Pekerjaan Umum berubah menjadi satu wilayah kerja yakni Kabupaten Bantaeng sendiri dengan pimpinan tetap Bapak Zainuddin sendiri sampai tahun 1981.

Pengganti Bapak Zainuddin adalah Bapak Abdullah Hakim, BA sampai pada tahun 1983. Pengganti Bapak Abdullah Hakim, BA adalah Bapak Kasiran Sidy, BE yang diangkat sebagai Pejabat pelaksana tugas dengan surat Keputusan Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng tanggal 17 Pebruari 1983.

Adapun Dinas PUK Dati II Bantaeng yang sekarang dibentuk berdasarkan dengan peraturan Daerah Nomor 07 tahun 1986, dan mengenai Dinas Pekerjaan Umum yang sudah dibentuk sebelum berlakunya peraturan Daerah di atas, diakui dan dinyatakan menjadi Dinas Pekerjaan Umum yang berdasarkan Peraturan Daerah No. 07 tahun 1986.

Kemudian jabatan Bapak Kasiran Sidy, BE diambil alih oleh Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng selaku Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

(PUK) untuk sementara kemudian pada tanggal 29 April 1989 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 821-22-103 Bapak Ir.Zainuddin Tahir sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (PUK) Dati II Bantaeng.

B. Struktur Organisasi Dinas PUK

Setiap kantor mempunyai struktur Organisasi terdiri dari, ada yang berbentuk line, staf dan ada pula yang berbentuk fungsional. Setiap bentuk struktur organisasi dalam suatu Kantor tergantung dari peraturan yang mengikat dari Kantor tersebut, dengan demikian sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat II Bantaeng No.07 tahun 1986 tanggal 31 Oktober 1986 yang diterbitkan oleh bagian hukum, organisasi dan tata-laksana Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng line dan Staf.

Untuk mengetahui secara mendalam suatu organisasi tidak hanya mengenal prinsipnya, ataukah cirinya saja tetapi yang lebih penting dan juga sekaligus pemahaman kita terhadap organisasi yang bersangkutan secara lebih luas dan mendalam adalah

mengenal struktur organisasinya, karena lewat struktur organisasi dapat diketahui sejauhmana peranan dan hubungan satuan-satuan yang ada dalam organisasi dan yang menetapkan hubungan-hubungan definitif, jadi suatu struktur organisasi tidak dapat terlepas dari hubungan antara fungsi-fungsi serta personil yang melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

Untuk mengetahui dan mengenal struktur organisasi biasanya melalui bagan organisasi, penggambaran struktur organisasi lewat bagan tersebut adalah sebagai upaya untuk secara cepat memperoleh gambaran yang jelas atau menyeluruh tentang sesuatu organisasi atau lewat bagan tersebut, dapat terlihat apakah seorang pejabat terlalu banyak pegawai yang dibawahinya atau tidak, dan bagi para bawahan lewat bagan tersebut menggambarkan tentang tempatnya atau posisinya dalam organisasi.

Dengan menggambarkan struktur organisasi dalam model bagan tersebut dapat diketahui tentang:

- a. Besarnya organisasi yang bersangkutan termasuk pembagian isinya dalam satuan-satuan organisasi.

- b. Saluran-saluran perintah dan tanggung jawab dari pucuk pimpinan dan sebaliknya beserta hubungan yang ada diantara satuan-satuan organisasi.
- c. Perincian dan batas-batas tugas setiap satuan organisasi tersebut dalam garis besarnya.
- d. Jabatan-jabatan yang terdapat pada organisasi tersebut dan bila perlu berikut nama pejabatnya masing-masing.

Keempat point di atas sebenarnya masih kurang, namun yang jelas bahwa bagan organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pendirian suatu organisasi.

Kejelasan tentang bidang-bidang dalam struktur organisasi seperti yang akan digambarkan belum dapat dikatakan baik manakalah fungsi dari masing-masing bidang tersebut belum terurai dan terpisah ke dalam masing-masing fungsi setiap bidang yang diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih (over lepping) tugas yang dapat menimbulkan kesalah pahaman dan saling menuding bilamana terjadi kesalahan dalam salah satu bidang. Maka dengan adanya job atau ketegasan fungsi

dari masing-masing bidang dapatlah dengan mudah direncanakan pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Agar tujuan organisasi tercapai dengan baik haruslah ada koordinasi sehingga semuanya berjalan dengan tertib kearah tercapainya tujuan organisasi. Dengan struktur organisasi dimaksudkan agar semua anggota mengetahui kedudukan, tugas dan fungsinya sehingga kegiatan berjalan baik.

Sesuai dengan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, maka:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (PUK) mempunyai otoritas komando untuk melaksanakan wewenang.
- b. Usaha Kepala Dinas PUK diperkuat oleh Staf.
- c. Semua pegawai dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, sebagai berikut:

1. a. Kepala Dinas
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi-Seksi

2. a. Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas urusan-urusan
b. Seksi terbagi atas sub seksi.
3. Bagian Tata Usaha dan urusan seksi-seksi dan sub seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala.
4. Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada No.1 bagian A dipimpin oleh seorang Kepala.
5. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Urusan umum
 - b. Urusan kepegawaian
 - c. Urusan Keuangan
 - d. Urusan tata laksana
6. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada No. 1 bagian 6 terdiri dari :
 - a. Seksi bina program
 - b. Seksi bangunan gedung
 - c. Seksi jalan dan bangunan air
 - d. Seksi perlengkapan, pergudangan dan perlengkapan, dan peralatan
 - e. Seksi tata lingkungan.
7. Tiap-tiap urusan sebagaimana yang dimaksud pada nomor 5 masing-masing dipimpin oleh seorang kepala urusan.

8. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada no. 7 masing-masing dipimpin oleh kepala urusan.
9. Seksi bina program terdiri dari:
 - a. Sub seksi penelitian
 - b. Sub seksi anggaran
 - c. Sub seksi evaluasi dan laporan.
10. Seksi bangunan gedung terdiri dari:
 - a. Sub seksi perumahan
 - b. Sub seksi perkantoran
 - c. Sub seksi gedung-gedung
11. Seksi jalan, jembatan dan bangunan air terdiri dari:
 - a. Sub seksi jalan
 - b. Sub seksi jembatan
 - c. Sub seksi bangunan air.
12. Seksi perbengkelan, pergudangan dan peralatan terdiri dari:
 - a. Sub seksi perbengkelan
 - b. Sub seksi pergudangan
 - c. Sub seksi alat-alat besar dan lain-lain.
13. Seksi tata lingkungan terdiri dari:
 - a. Sub seksi perencanaan dan pengendalian kota
 - b. Sub seksi sempadan
 - c. Sub seksi kebersihan.

Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (PUK) Daerah Tingkat II Bantaeng, sebagaimana terlampir.

Tata Kerja Dinas PUK

- a. Kepala Dinas melakukan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- b. Bila mana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka perubahan mendapatkan keputusan.
- c. Setiap pembina mempunyai satuan organisasi yang mempunyai urusan atas sub seksi yang ditempatkan.
- d. Kepala Dinas memimpin setiap sub seksi yang ditempatkan dibawahnya dalam arti memelihara dan memajukan keseluruhan organisasi dan menetapkan prinsip koordinasi dan menetapkan aturan Dinas dalam lingkungan instansi.

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, mempunyai kedudukan sebagai berikut:

- a. Meneruskan kebijaksanaan tehnik
- b. Mengamalkan pelaksanaan tugas pokok dan pengenalan tehnik.
- c. Sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang berdasarkan Peraturan UUD.
- d. Melaksanakan tugas pokok dalam tugas lainnya dengan peralihan serta perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas pokok pengolahan tehnik
- b. Melaksanakan tugas bantuan yang diusahakan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya.

3. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (PUK)

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah bidang pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

- b. Mengamankan pelaksanaan Tugas Pokok sesuai dengan peralihaan.
- c. Meneruskan kebijaksanaan secara terus menerus.

D. Keadaan Pegawai

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng sebagai pelaksana sebagian rumah tangga daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka dalam melaksanakan tugasnya tersebut mempunyai personil/pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang mengangkatnya sesuai dengan syarat-syarat pengangkatan pegawai negeri sipil.

Selanjutnya untuk mengetahui suatu gambaran tentang mutu pegawai dilihat dari segi pendidikan formal maka berikut ini akan kita lihat masing-masing pegawai berdasarkan klasifikasi ijaza. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 01

**KEADAAN PEGAWAI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
DATI II BANTAENG MENURUT PENDIDIKAN**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	Sarjan Lengkap (S-1)	7	24
2.	Sarjana Muda (SM)	7	16
3.	SLTA (SMU)	12	40
4.	SMP	6	20
5.	Sekolah Dasar (SD)	-	-
J u m l a h		30	100 %

Sumber Data : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Bantaeng, Tahun 1998.

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, memperlihatkan bahwa pegawai yang paling banyak adalah dengan tingkat pendidikan SMU yaitu 12 orang pegawai atau 40 %, dan yang paling rendah tingkat pendidikannya adalah pegawai yang berijaza SMP yakni 6 orang pegawai atau 20 %.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengetahui jenjang pangkat dan golongan pegawai

pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dapat diperinci sebagai berikut:

TABEL 02

KEADAAN PEGAWAI DINAS PUK MENURUT GOLONGAN

No.	Golongan / Ruang	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	IV	1	
2.	III	16	
3.	II	11	
4.	I	2	
Jumlah		30	

Sumber Data : Kantor Dinas PUK Kabupaten Dati II Bantaeng Tahun 1998.

Dari tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa, pegawai yang paling banyak mempunyai golongan III yaitu sebanyak 16 orang pegawai, dan yang paling rendah golongannya adalah pegawai golongan II hanya 2 orang pegawai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan

Pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng telah dikemukakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan secara umum. Pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan jalan merupakan kebijaksanaan serta program yang akan pemerintah dewasa ini dalam rangka meningkatkan pembangunan jalan dan penyempurnaan dari berbagai kebijaksanaan pembangunan daerah yang tahun-tahun sebelumnya.

Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan itu memerlukan adanya pengawasan yang tangguh dan ulet, dimana pelaksanaan pengawasan pembangunan jalan di arahkan untuk meletakkan dasar sebagai landasan pembangunan nasional jangka panjang dengan sasarannya adalah pembangunan jalan dapat berkembang menjadi satu

kesatuan terkecil administrasi pemerintahan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Dengan demikian dalam pelaksanaan program proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng maka diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan yang baik yaitu:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Bimbingan dan penyuluhan tentang pengertian manfaat dan tujuan-tujuan bantuan langsung dari pemerintah.
 - b. Meningkatkan kesadaran tentang peran serta dan tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan jalan untuk itu perlu adanya pengawasan yang baik sehingga pelaksanaan pengawasan pembangunan jalan dapat berjalan dengan baik.
2. Pengawasan pelaksanaan bantuan langsung dilakukan oleh

a. Pengawasan fungsional yang terdiri dari:

- Badan Pemeriksa Keuangan
- Inspektorat Jenderal Pembangunan
- Badan pengawasan keuangan dan pembangunan
- Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri
- Inspektorat Jenderal Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.
- Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

b. Pengawasan melekat dilakukan oleh aparat pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan seperti tingkat Pusat sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan secara vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pengawasan oleh masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat, yaitu berupa kritikan dan saran yang membangun agar pelaksanaan proyek pembangunan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disahkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terlihat bahwa pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan

jalan dilaksanakan secara bersama antar masyarakat itu sendiri dengan pemerintah setempat ini berarti wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan jalan, berjalan dengan secara lancar.

Untuk lebih jelasnya tentang pengawasan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 03
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENGAWASAN DINAS PU
TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN
JALAN DI KABUPATEN DATI II BANTAENG

No.	Kriteria Penilaian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Lancar	12	40
2.	Cukup lancar	15	50
3.	Kurang lancar	3	10
4.	Tidak lancar	-	-
J u m l a h		30	100 %

Sumber Data : Hasil pengolahan kuesioner, Tahun 1998.

Dari tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng adalah cukup lancar. Hal ini terbukti dengan adanya tanggapan responden yang memberikan penilaian masing-masing mengatakan lancar yakni 12 orang responden atau 40 %, selanjutnya yang mengatakan penilaiannya cukup lancar 15 orang responden atau 50 %, serta yang mengatakan kurang lancar hanya 3 orang responden atau 10 %, dan yang mengatakan tidak lancar tidak ada.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng telah dapat merealisasikan maksud dan tujuan dari kebijaksanaan pembangunan jalan tersebut, untuk itu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Secara bertahap membebaskan semua desa/kelurahan dari keterpencilan dengan melaksanakan berbagai pelaksanaan pembangunan jalan atau prasarana perhubungan dengan pusat-pusat pembangunan/fasilitas

utamanya dengan di Kota-kota lainnya, sehingga itu terbuka isolasi desa atau kelurahan terpencil yang selanjutnya akan tumbuh dan berkembang menjadi suatu daerah yang maju.

- b. Serta menata kembali wilayah pembangunan jalan yang selanjutnya akan diprioritaskan pada waktu-waktu yang akan datang.
- c. Untuk meningkatkan mutu aparatur pemerintah daerah agar mampu menyelenggarakan pembangunan jalan pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya, serta dapat mendorong penduduk untuk menggerakkan masyarakat berperan serta secara aktif dalam pembangunan khususnya pembangunan jalan agar dapat meningkatkan pengawasan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar.
- d. Untuk mengadakan koordinasi yang lebih baik terhadap semua program dan kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan jalan agar dapat meningkatkan kenikmatan masyarakat umum.

Secara khusus tujuan pembangunan jalan adalah bertujuan untuk mengawasi/mengontrol setiap pelaksanaan pekerjaan/proyek-proyek pembangunan jalan yang

sedang giat dilaksanakan pembangunannya agar segala sesuatunya yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah tersebut yang telah direncanakan sebelumnya.

Dan akhirnya tujuan pengawasan Dinas Pekerjaan umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dapat disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan kemudian proyek tersebut dapat selesai tepat pada waktunya yang telah ditetapkan pula sesuai rencana anggaran proyek tersebut.

Kemudian pengawasan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan kepada para petugas dapat ditingkatkan dengan menetapkan petunjuk kerja yang obyektif dan secara efektif atas dasar pembangunan dengan prinsip penggunaan waktu maupun materi secara tepat dan berguna. Untuk melihat gambaran tentang tingkat pengawasan disiplin petugas pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bantaeng dapat dilihat melalui hasil tanggapan responden seperti pada tabel berikut:

TABEL 04
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP TINGKAT PENGAWASAN
DISIPLIN PETUGAS

No.	Kriteria Penilaian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat disiplin	9	30
2.	Disiplin	12	40
3.	Cukup disiplin	6	20
4.	Kurang disiplin	3	10
Jumlah		30	100 %

Sumber Data : Hasil pengolahan kuesioner, 1998.

Berdasarkan data hasil penelitian pada tabel tersebut bahwa tingkat pengawasan disiplin petugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng memperlihatkan adalah cukup. Hal ini memperlihatkan masing-masing responden memberikan penilaiannya yakni disiplin ada 9 orang responden atau 30 %, selanjutnya yang memberikan penilaian cukup disiplin 12 orang responden atau 40 %. Yang mengatakan penilaiannya kurang disiplin 6 orang responden atau

20%, dan yang mengatakan penilaiannya tidak disiplin hanya 3 orang responden atau 10%.

Dengan demikian terlihat bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng adalah cukup disiplin.

Selanjutnya sistem pengawasan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu artinya dilakukan oleh beberapa pihak yang berkepentingan terhadap pekerjaan pembangunan. Dari pemahaman tersebut dapat diklasifikasikan pengawasan pembangunan jalan pada umumnya yang kini dimaksudkan agar penyelenggaraan harus tetap bertanggung jawab konstitusional, jadi pengawasan pembangunan jalan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan secara umum.

Tetapi apabila dilihat dari sudut yang sempit yaitu bagaimana cara tetap mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan jalan secara institusional, maka dalam hal ini dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bantaeng menjelaskan bahwa:

- a. Pengawasan serta hak-hak yang dimiliki oleh aparat pemerintah untuk mengusahakan pelaksanaan pembangunan.
- b. Para pemerintah negara yang diberikan kedudukan yang kuat dan bebas serta cukup tinggi kepada kekuasaan yudisil maka kekuasaan ini juga mempunyai hak-hak pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah dalam pembangunan.
- c. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri melalui lembaga-lembaga atau organisasi-organisaasi dalam masyarakat itu sendiri.

Dari ketiga cara pengawasan pembangunan tersebut itu dapat dipahami bahwa pada setiap diadakannya pengawasan dalam setiap kegiatan pada suatu organisasi terutama dalam pemerintahan dan pembangunan adalah untuk tercapainya efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan tertentu yaitu:

- a. Melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.

- b. Bahwa struktur serta hirarkhi organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan rencana.
- c. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab di dalam pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan rasional dan tidak atas dasar sesukanya seseorang pejabat untuk mengangkat atau menempatkan personilnya.
- d. Sistem prosedur kerja tidak menyimpang dari garis kebijaksanaan yang telah dicerminkan dalam rencana.
- e. Telah terdapat penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, maupun kewenangan terutama di bidang keuangan.

Dengan demikian agar supaya proyek pembangunan jalan dengan berjalan sebagaimana mestinya maka diperlukan teknik-teknik pengawasan yang baik antara lain:

1. Pengawasan langsung (Direct Control) yaitu suatu sistem pengawasan dimana pimpinan, organisasi sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang digiatkan. Dalam upaya meningkatkan pengawasan oleh atasan langsung dalam pelaksanaan proyek

pembangunan jalan, maka dilakukan sistem atau metode pengawasan dengan dua bentuk yaitu, sistem pelaporan dan sistem pemantauan secara langsung kelapangan atau obyek proyek yang sedang dikerjakan.

Dalam menjalankan sistem pelaporan maka setiap petugas/pengawas melaporkan hasil-hasil pekerjaan secara langsung kepada atasan langsungnya dimana jadwal yang lebih terinci, diatur oleh masing-masing bidang/bagian.

Dalam pertemuan yang diadakan pada tingkat eselon IV para kepala seksi/sub bagian di dalam organisasi pelaksana Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada atasan langsungnya yang selanjutnya pada pertemuan tingkat eselon III para kepala bidang/bagian melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada atasan langsungnya yaitu kepala Kantor Dinas Pekerjaan umum sebagai Pejabat eselon II.

Hasil-hasil pelaporan yang diberikan oleh masing-masing petugas atau aparat yang ber-

sangkutan, dievaluasi dipelajari dan dianalisis untuk dapat mengetahui dengan jelas proses kegiatan yang sedang berlangsung. Dengan tindakan tersebut, dapat diketahui efisiensi atau efektivitas pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan jalan yang sedang berlangsung.

Sesuai dengan hasil wawancara kepada responden menjelaskan bahwa untuk mendukung hasil temuan-temuan pada pelaporan yang disampaikan di atas, para atasan langsung juga dapat melakukan pengawasan langsung ke obyek kegiatan atau lokasi proyek pembangunan jalan. Hal ini sebaiknya jadwal kunjungan yang telah ditetapkan diupayakan untuk dipenuhi sehingga diperoleh kejelasan dan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kegiatan proyek pembangunan jalan yang dilaksanakan.

Di dalam kunjungan langsung ini, pengawasan Dinas Pekerjaan Umum tersebut pengawasan yang dilakukan dapat diperketat dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab yang dijadikan responden dan dianggap dapat lebih memberikan manfaat untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ditemui

dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan tersebut.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini hanya menitik beratkan pada evaluasi terhadap laporan-laporan baik lisan maupun tulisan yang diterimanya.

Berdasarkan dengan hasil wawancara penulis terhadap salah seorang responden menjelaskan bahwa pengawasan proyek pembangunan jalan sering dilakukan secara terpadu sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dengan demikian pengawasan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, yang biasa dilakukan dalam memantau proyek pembangunan jalan ini yaitu:

a. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Dengan

demikian pengawasan mengumpulkan segala data atau informasi yang dikumpulkan oleh pimpinan organisasi, untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Jadi hasil pengawasan dapat digunakan menilai kebijaksanaan pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan atau ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan.

Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan perbaikan atau koreksi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan. Internal kontrol misalnya Inspektorat Jenderal itu adalah aparat pengawasan Departemen.

b. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan dari luar organisasi atau eksternal control yang berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi. Pengawasan dari luar organisasi itu adalah aparat pengawas yang bertindak atas nama dari pimpinan organisasi karena permintaannya. Misalnya pengawasan yang dilakukan

oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap sesuatu Departemen dan atas nama pemerintah/presiden melalui Menteri Keuangan, sedangkan adalah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia, atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya untuk mengadakan pemeriksaan pengawasan proyek pembangunan jalan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, untuk melihat dengan jelas pelaksanaan tugas pengawasan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan secara efektif dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 05

**TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM TERHADAP PELAKSANAAN
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN**

No.	Kriteria Penilaian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat meningkat	10	33
2.	Meningkat	12	40
3.	Cukup meningkat	7	24
4.	Kurang meningkat	1	3
J u m l a h		30	100 %

Sumber Data : Hasil pengolahan kuesioner, Tahun 1998.

Berdasarkan data hasil penelitian pada tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa peningkatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng adalah cukup meningkat. Untuk membuktikan hal tersebut masing-masing responden memberikan penilaiannya yaitu yang mengatakan meningkat 10 orang responden atau 33 %, selanjutnya yang mengatakan cukup meningkat yakni 12

orang atau 40 %, yang mengatakan kurang meningkat 7 orang responden atau 24 %, dan yang mengatakan penilaiannya tidak meningkat hanya 1 orang responden atau 3 %.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan telah berjalan dengan cukup meningkat.

B. Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan Jalan dan Hasilnya

Pelaksanaan pengawasan pembangunan jalan pada awalnya dibuat suatu perencanaan, dimana dalam proses pembangunan dewasa ini perencanaannya dimulai dari masyarakat. Seperti halnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng perencanaan program pembangunan jalan pertama-tama perencanaan itu disusun oleh masing-masing unit kerja badan perencanaan karena perencanaan pembangunan jalan hanya dilakukan oleh beberapa lembaga yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam perencanaan pembangunan menurut fungsi utama dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng. Sebagai lembaga atau badan yang mempunyai tugas/fungsi sebagai perencana pembangunan daerah yang bersangkutan perlu mengetahui bagaimana kondisi yang ada sekarang ini sebagai bahan melakukan perencanaan, tahun berikutnya baik dilihat dari aspek kuantitas serta kualitas maupun aspek pemanfaatan realisasi rencana yang dilakukan. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran sejauhmana peranan serta fungsi dalam melaksanakan fungsinya sebagai badan perencana di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian dan hasil wawancara penulis kepada responden menyatakan bahwa aspek kuantitas dan kualitas fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dalam pelaksanaan pengawasan program pembangunan jalan di Kabupaten Dati II Bantaeng dapat dilihat dari beberapa indikator melalui program kerjanya dalam tahun anggaran 1996/1997 sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan rutin

Rencana kegiatan rutin dimaksudkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dalam rangka pengawasan pembangunan jalan berdasarkan ~~analisa dan perencanaan~~ dan monitoring kegiatan tahunan berjalan sebagai bahan pertimbangan rencana kegiatan rutin tahun berikutnya untuk mengetahui besarnya sumber daya dana yang tersedia dalam kurun waktu satu tahun.

Untuk melihat kegiatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam pelaksanaan pengawasan program proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tersebut berikut dapat dikemukakan langkah-langkah kegiatan rutinnya sebagai berikut:

- a. Pembuatan surat edaran Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng tentang permintaan Daftar Usul Proyek dari masing-masing unit kerja pemerintah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

b. Penelitian Daftar Usulan Proyek berdasarkan Skala prioritas hasil rapat koordinasi Tingkat II.

c. Penentuan rencana pelaporan anggaran masing-masing program dari unit-unit kerja pemerintah daerah Tingkat II Bantaeng.

2. Dalam rangka ~~pelaksanaan kegiatan program~~

pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, maka dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga membentuk tim untuk membahas kegiatan-kegiatan tersebut maka untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut diadakan pula kegiatan seperti:

a. Rapat lengkap tim untuk membahas perhitungan anggaran dan perubahan anggaran pembangunan proyek jalan untuk tahun anggaran sekarang dan mendatang.

b. Laporan hasil rapat tim kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng.

c. Konsultasi Panitia anggaran DPRD Tingkat II Bantaeng.

d. Penyampaian anggaran dan nota perhitungan keuangan anggran setiap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Perlu dikemukakan disini bahwa pengawasan program pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk mengawasi kegiatan dan pembuatannya seperti jadwal pelaksanaan pembangunan proyek jalan semuanya menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng yang diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah dan pelaksanaan kegiatan ini selalu dilaksanakan pada pertengahan tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden menjelaskan bahwa untuk lebih memperlancar program pembangunan jalan dalam mencapai sasaran dari pelaksanaan program pembangunan jalan maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng langsung mengadakan pengawasan untuk melihat kegiatan-kegiatan pembangunan proyek jalan di lapangan dan sebagai pimpinan proyek

pembangunan jalan yang telah menerima daftar usulan proyek pembangunan jalan dari Kabupaten dan harus dapat membagi tugas terhadap aparatnya yaitu:

- a. Pelaksanaan harian proyek pembangunan jalan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai penanggung jawab perencanaan suatu kegiatan.
- b. Sekretaris pelaksanaan program pembangunan proyek yang bertanggung jawab atas administrasi proyek.
- c. Bendahara proyek pembangunan sebagai pemegang kas proyek bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan dan membayar uang program pelaksanaan pembangunan serta menyelenggarakan administrasi pembukuannya.
- d. Ketua Seksi Program pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai pembantu dalam melaksanakan proyek, dan harus bertanggung jawab terhadap keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Dari berbagai uraian-uraian tersebut untuk dapat mengukur keberhasilan dari pelaksanaan proyek pembangunan jalan adalah bagaimana program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan, dan apakah pengaruh program pembangunan proyek jalan itu benar-benar sangat dirasakan oleh masyarakat banyak.

Namun demikian pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng masih terlihat dalam pelaksanaannya yang kurang memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan. Akan tetapi namun demikian untuk dapat mengetahui lebih jelas dapat dilihat melalui hasil penelitian tanggapan responden pada tabel berikut:

TABEL 06

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK
PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN DATI II BANTAENG

No.	Kriteria Penilaian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Baik Sekali	7	24
2.	B a i k	11	36
3.	Cukup baik	9	30
4.	Kurang baik	3	10
J u m l a h		30	100 %

Sumber Data : Hasil Pengolahan kuesioner, Tahun 1998.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pada umumnya responden mengatakan penilaiannya adalah baik. Untuk membuktikan hal ini masing-masing responden memberikan penilaiannya, yang sangat baik ada 7 orang responden atau 21 % selanjutnya yang mengatakan penilaiannya baik 11 orang responden atau 36 %, yang mengatakan penilaiannya cukup baik 9 orang responden atau 30 %, dan yang mengatakan kurang baik hanya 3 orang responden atau 10%. Ini berarti bahwa bila diamati dari persentase tanggapan responden tersebut, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan program proyek pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pelaksanaannya adalah baik.

Pelaksanaan pengawasan program pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng menurut responden dan hasil pengamatan penulis di lapangan selama penelitian hasilnya dapat menggembirakan dalam lima tahun terakhir ini.

Hal ini terlihat dari hasil-hasil yang telah dicapai dimana dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan baik dari jumlah proyek pembangunan jalan yang dibangun maupun proyek pembangunan penerangan jalan telah menunjukkan peningkatan. Untuk dapat lebih mengetahui hasil yang dicapai berhubungan dengan peningkatan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dapat dilihat seperti digambarkan melalui hasil tanggapan responden pada tabel berikut:

TABEL 07
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENINGKATAN HASIL
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANTAENG

No.	Kriteria Penilaian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat meningkat	8	27
2.	Meningkat	13	43
3.	Cukup meningkat	6	20
4.	Kurang meningkat	3	10
J u m l a h		30	100 %

Sumber Data : Hasil pengolahan kuesioner, tahun 1998.

Pada tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa peningkatan hasil pelaksanaan program pembangunan proyek jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng adalah meningkat. Untuk membuktikan hal tersebut masing-masing responden memberikan penilaiannya yang mengatakan sangat meningkat 8 orang responden atau 27%, selanjutnya yang mengatakan meningkat 13 orang responden atau 43 %, yang mengatakan penilaiannya cukup meningkat 6 orang responden atau 20 %, dan yang mengatakan penilaiannya kurang meningkat 3 orang responden atau 10 %. Dengan demikian terlihat pula bahwa peningkatan hasil pelaksanaan pembangunan jalan tersebut telah meningkat namun masih ada responden yang memberikan penilaiannya kurang meningkat.

C. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan

Pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan jalan oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng telah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, lemahnya pengawasan langsung, rendahnya

kesadaran aparat pengawasan, kurangnya tindak lanjut hasil pengawasan.

1. Lemahnya pengawasan atasan langsung

Pelaksanaan kegiatan pengawasan atasan langsung pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pada proyek pembangunan jalan maka salah satu hal yang terlihat adalah masih lemahnya pengawasan atasan langsung.

Dari struktur organisasi proyek pembangunan jalan oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantaeng terlihat bahwa lingkup kegiatan pelaksanaan proyek pembangunan jalan ini adalah peningkatan institusi atau lembaga/organisasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan peningkatan sumber daya manusia. Hal ini mengakibatkan tugas dari atasan langsung untuk mengadakan pengawasan yang dilakukan terlihat lemah.

Lemahnya pengawasan langsung pada pelaksanaan proyek pembangunan jalan terlihat dalam hal sebagai berikut:

- a. Metode pengawasan yang dijalankan belum terlihat jelas bentuk dan standar penetapannya.
- b. Perencanaan pengawasan belum tersusun dengan rapi dan baik.
- c. Hasil pengawasan belum mengungkapkan hasil yang sebenarnya.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat diperoleh gambaran dari hasil penelitian di lapangan dengan melalui tanggapan responden seperti digambarkan pada tabel berikut ini:

TABEL 08
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENGAWASAN ATASAN
LANGSUNG PADA PELAKSANAAN PROYEK
PEMBANGUNAN JALAN

No.	Kriteria Penilaian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat lancar	3	10
2.	Lancar	9	30
3.	Cukup lancar	12	40
4.	Kurang lancar	6	20
J u m l a h		30	100 %

Sumber Data : Hasil pengolahan kuesioner, Tahun 1998.

Berdasarkan data hasil penelitian pada tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa pengawasan atasan langsung pada pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng masih diperhadapkan pada kekurang lancarnya pengawasan atasan langsung terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan tersebut. Terlihat dengan adanya responden yang memberikan penilaiannya yang mengatakan sangat lancar ada 3 orang responden atau 10 %, yang mengatakan penilaiannya lancar 9 orang responden atau 30 %, yang mengatakan kurang lancar 12 orang responden atau 40 %, dan yang mengatakan tidak lancar 6 orang responden atau 20 %.

Sebab itu untuk menciptakan suatu pengawasan atasan langsung yang efektif dan efisiensi tentunya harus didukung dengan metode-metode yang tepat dan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Metode pengawasan yang baik seharusnya dapat melaksanakan pemantauan, pemeriksaan dan penilaian agar mampu mengungkapkan segala sesuatu yang ingin diketahui dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk menciptakan suatu pengawasan atasan langsung yang sederhana, namun sesuai dengan kegiatan pokok pada pelaksanaan proyek pembangunan jalan disamping memerlukan pengetahuan yang cukup juga dituntut adanya pengalaman mengenai tugas-tugas yang diembannya bagaimana kewenangannya dan hubungannya dengan pejabat lain di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Karena tidak jelasnya metode pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung terlihat dari beberapa tindakan pengawasan yang dilakukan seperti tidak jelas apakah pimpinan melakukan pemeriksaan langsung ataukah melalui laporan-laporan yang diterima.

Sedangkan mengenai perencanaan pengawasan yang dilakukan terlihat pula tidak terlaksana dan tidak tersusun dengan baik sehingga rencana-rencana yang dibuat tidak dapat direalisasikan, khususnya menyangkut prioritas perencanaan pengawasan secara langsung pada pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan jalan.

Rencana yang disusun proyek pembangunan jalan tidak terealisasikan hingga pada akhir tahun anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan belum tersusun dengan baik dan rapi.

Keada faktor di atas maka lemahnya pengawasan atasan langsung yang dilakukan pada proyek pembangunan jalan adalah hasil pengawasan belum mengungkapkan hasil yang semestinya dan sebenar-benarnya.

Pengawasan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung belum dapat menjamin obyektivitas kegiatan, di lapangan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak dapat diketahui hal-hal positif maupun hal-hal negatif di lapangan yang dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan proyek pembangunan jalan pada masa-masa yang akan datang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan atasan langsung pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng masih mempunyai kelemahan-kelemahan.

2. Rendahnya/kurangnya kesadaran aparat pelaksana

Aparat pelaksana adalah aparat pelaksana kegiatan di lapangan yang melaksanakan kegiatan proyek pembangunan jalan yaitu pelaksana monitoring data dan evaluasi data kegiatan yang dilaksanakan.

Menurut salah seorang responden yang diwawancarai penulis selama melaksanakan penelitian menjelaskan bahwa salah satu rendahnya penyebab kesadaran aparat pelaksana di lapangan baik menyangkut pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan jalan adalah kurangnya disiplin aparat pelaksana. Kurangnya disiplin aparat pelaksana tercermin dari beberapa tindakannya, yaitu:

- a. Laporan bulanan maupun laporan tahunan mengenai tahap-tahap pekerjaan proyek, baik menyangkut kemajuan dan hambatan-hambatan yang dijumpai di lapangan, sering kali terlambat dibuat suatu pedoman pelaksanaan pengawasan, sehingga pihak atasan langsung sulit untuk mengadakan evaluasi secara rutin.
- b. Komunikasi antara aparat pelaksana di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

c. Kebijakan yang digariskan dari atasan langsung belum selaras dengan pelaksanaan di lapangan, baik menyangkut waktu penyelesaian, sarana dan prasarana yang seharusnya dipakai, serta standar dana belum nampak dilaksanakan dengan baik.

Hal-hal tersebut di atas menjadi penyebab kurangnya disiplin oleh aparat pelaksana di lapangan sehingga hal ini terus menerus berlangsung dapat menghambat kegiatan proyek pembangunan jalan yang sementara dilaksanakan.

Disamping itu faktor kurangnya disiplin aparat yang menjadi salah satu hal sehingga kesadaran aparat pelaksana proyek rendah maka inilah yang terlihat sebagai akibat kurangnya atau rendahnya kesadaran aparat pelaksana dalam hal pembuatan laporan kegiatan pekerjaan proyek pembangunan jalan. Pembuatan laporan yang diharapkan dapat mencerminkan sejauhmana kegiatan tersebut telah dicapai dalam pekerjaan dan pelaksanaan proyek pembangunan jalan, terlihat

belum efektif sehingga keadaan di lapangan sangat berbeda dengan pelaporan yang dilakukan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng bahwa belum efektifnya pelaporan yang dibuat terlihat dari beberapa hal pokok didalam laporan yang dibuat yaitu:

- a. Isi laporan belum menggambarkan isi pokok berkenaan dengan permasalahan yang dijumpai di lapangan atau lokasi proyek pembangunan.
- b. Laporan yang dibuat belum menggambarkan:
 - Bagaimana standar biaya yang dimanfaatkan.
 - Bagaimana standar kualitas prestasi kerja aparat di lapangan.
- c. Laporan yang dibuat belum layak seperti bentuk laporan yang sesungguhnya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sistem pelaporan aparat pada proyek pembangunan jalan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng belum efisien dan efektif dari pelaksanaan proyek pembangunan tersebut.

3. Kurangnya tindak lanjut hasil pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan secara langsung di lapangan bahwa beberapa permasalahan khususnya di dalam kegiatan pengawasan yang dijumpai belum ditindak lanjuti oleh aparat yang berwenang di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Bantaeng sehingga permasalahan yang timbul belum seluruhnya dapat berhasil diatasi.

Kurangnya tindak lanjut hasil pengawasan pada pelaksanaan proyek pembangunan jalan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Tindakan administrasi terhadap aparat yang tidak disiplin jarang dilaksanakan sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan sering terdapat kesalahan.
- b. Pembinaan dan bimbingan terhadap pegawai dan aparat pelaksana belum dilaksanakan dengan baik.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut terhadap tindak lanjut hasil pengawasan program proyek pembangunan jalan yang dilaksanakan akan mengurangi kualitas dan hasil pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng telah berjalan cukup baik dan dapat merealisasikan maksud dan tujuan dari kebijaksanaan pembangunan jalan tersebut. Dari 30 orang responden yang dimintai tanggapannya 15 orang atau 50 % yang mengatakan cukup lancar, ini berarti bahwa pengawasan Dinas PUK Bantaeng terhadap proyek pembangunan jalan sudah berjalan dengan cukup baik.

2. Pelaksanaan pengawasan program pembangunan jalan pada awalnya dibuat suatu perencanaan, sehingga program pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng melaksanakan pengawasan sesuai dengan jadwal kegiatan di lapangan. Dan sesuai hasil pengamatan penulis selama penelitian hasilnya dapat mengembirakan.

3. Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan adalah sebagai berikut:

- a. Lemahnya pengawasan atasan langsung
- b. Rendah/kurangnya kesadaran aparat pelaksana
- c. Kurangnya tindak lanjut hasil pengawasan.

8. Saran-Cara:

1. Bahwa pelaksanaan pengawasan program pembangunan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, disarankan agar lebih meningkatkan pengawasan proyek pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum tersebut.
2. Disarankan agar pelaksanaan kegiatan pengawasan atasan langsung pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pada proyek pembangunan jalan supaya ditingkatkan sehingga proyek tersebut berjalan dengan baik.
3. Pengawasan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung belum dapat menjamin obyektivitas kegiatan di lapangan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak dapat diketahui hal-hal yang positif, maupun hal-hal yang negatif di lapangan yang dapat menjadi bahan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, DR. 1992. Manajemen Penelitian, Jakarta. Bina Aksara.
- Atmosudirodjo, S. Prajudi, 1989. Dasar-Dasar Ilmu Administrasi dan Manajemen Umum, Jilid III Jakarta Bina.
- Saratha, I., Nyoman, Dr. 1982. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta ; Ghalia Indonesia.
- Handayanigrat, Soewarno, Drs. 1981. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Gunung Agung
- Mohammed Syukur Abdullah, 1988. Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi, Ujung Pandang Lepas.
- Siagian, SP. 1982. Filsafat Administrasi, Jakarta : Gunung Agung.
- Sujanto, Ir. 1983. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan Jakarta ; Ghalia Indonesia.
- Suryaningrat, Bayu, Drs. 1984. Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan Indonesia, Jakarta: Bina Aksara.
- Sarwoto, 1981. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta : Ghaliah Indonesia.
- Ijokroamidjojo, Bintoro, 1985. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta : LP3ES.
- Instruksi Presiden Indonesia No. 15 Tahun 1983. tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Jakarta.